

**MOTIVASI TIONGKOK MENOLAK MEKANISME PENGURANGAN EMISI GAS  
KARBON DALAM THE DOHA CLIMATE GATEWAY  
TAHUN 2012**

**Oleh:**

**Yudho Prasetyo**

Email: yudho\_prasetyo@ymail.com

**Pembimbing Afrizal S.IP MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

***Abstract***

*This research describes the motivation of Tiongkok rejected the emission trading in Doha Climate Gateway in 2012. Nowadays the climate changes are one of important issue in international relations Kyoto Protocoll are a diplomacy arround to tell about the climate change with some steps are joint implementations, emission trading and carbon mechanism.*

*The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the motivation of Tiongkok rejected the emission trading in Doha Climate Gateway. The theories applied in this research are decisions making policy theory by Graham T. Allison and national interest concept from Donald E. Nuchterlain.*

*The research shows that the motivation of Tiongkok rejected the emission trading in Doha Climate Gateway cause some factors are disadvantages for national interest of Tiongkok, increase of emission carbon in the world and disadvantage for Tiongkoj indutrialization and some state of Kyoto Protocoll member notyet dealling about the emission trading.*

***Key words:*** *motivation, reject, emision and trade.*

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik luar negeri yang menganalisis motivasi Tiongkok menolak mekanisme pengurangan emisi gas karbon dalam *The*

*Doha Climate Gateway* tahun 2012. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada motivasi Tiongkok tidak menyepakati perjanjian *Doha Cilmate Gateway* mengenai perubahan iklim.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan perubahan iklim didunia internasional. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai motivasi Tiongkok menolak mekanisme pengurangan emisi gas karbon dalam *The Doha Climate Gateway* tahun 2012.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnl, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah tahun 2012. Tahun 2012 dipilih karena pada saat itu Pemerintah Tiongkok tidak menyepakati hasil perjanjian Doha Qatar. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan realis yang mempunyai tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*).<sup>1</sup> Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional.

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan

---

<sup>1</sup> Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

internasional adalah perilaku negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Tingkat analisa bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah negara.

Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti.<sup>2</sup> Maka dari itu Tiongkok sebagai sebuah negara yang berdaulat memperlihatkan kemampuan dan hasil dari kegiatan itu.

Analisa manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik negara lain dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.<sup>3</sup> Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa negara bangsa dengan menitikberatkan pembahasan pada kebijakan Pemerintah Tiongkok menolak mekanisme pengurangan emisi gas karbon dalam *The Doha Climate Gateway*.

---

<sup>2</sup> Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin, 1990, hal 127

<sup>3</sup> Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>4</sup>

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri merupakan mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan.

---

<sup>4</sup> K J. Holsti. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. 1992. Bandung: Binacipta. Hlm. 16

Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (*Struggle for power*), kedudukan negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingannya yang mendasar. Maka secara umum, negara-negara merasa tidak aman sehingga timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Mereka menjadi sangat fokus dengan kekuatannya masing-masing dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyerangan oleh negara lain.

Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.<sup>5</sup> Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.<sup>6</sup>

Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun

latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan. Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>7</sup>

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia. Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai yang terdapat dalam sistemnya.<sup>8</sup>

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan

---

<sup>5</sup> Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakary, Bandung 2005 hal 35.

<sup>6</sup> Perwita dan Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 47

---

<sup>7</sup> K.J. Holtsi, *Politik Internasional : Kerangka Analisis Pedoman Ilmu*, Jakarta, 1987, hal 88.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 133

dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>9</sup> Dalam pembuatan kebijakan atau keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik.
2. Menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam

---

<sup>9</sup> Jack C. Plano. Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua, penerbit Putra A Bardin, cv 1999. hal 5-6  
<sup>10</sup> Ibid. Hlm 16

menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Graham T. Allison mengenai tiga model kebijakan luar negeri. Menurut Graham T. Allison, ada tiga macam model analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu Negara, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Model Aktor rasional, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan pertimbangan dan perhitungan aktor-aktor politik.
2. Proses Organisasi, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan proses alami (Sistematis) oleh para aktor pemerintah. Proses organisasi, dalam model ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang memiliki berbagai organ dengan fungsi berbeda, yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Pada model proses organisasi ini, masalah yang muncul adalah bagaimana sebuah keputusan yang diambil berdasarkan standard *operating procedures* dalam pemerintahan cenderung diasumsikan *predictable* dan tetap sesuai pola aksi tertentu.

---

<sup>11</sup> Mochtar mas'ood, ilmu hubungan internasional "Disiplin dan Metodologi" edisi revisi hal 223

3. Politik Birokratik: Gabungan dari kedua model diatas. Proses hubungan luar negeri dibuat berdasarkan kerjasama antar elemen pemerintah dan kelompok kepentingan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan luar negeri terjadi dengan adanya interaksi diantara pemerintah dan kaum swasta

Model Graham T. Allison tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, unsur domestik, baik itu berupa nilai-nilai yang dianut pemimpin, kepentingan para birokrat, sampai pada cara pemimpin menganalisa situasi domestik sangat berpengaruh. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual.

Dari teori Graham T. Allison, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Tiongkok menolak mekanisme pengurangan emisi gas karbon dalam *The Doha Climate Gateway* tahun 2012 didasarkan pada politik birokratik. Kebijakan Tiongkok dalam menolak mekanisme perdagangan karbon dalam konferensi Doha tahun 2012 dapat dilihat dari peran politik birokratik didalam pemerintahan Tiongkok melalui Perwakilan Pemerintah Tiongkok dalam *Conference of The Parties*. Hal ini tentu saja didasarkan

dari pandangan pemerintah Tiongkok terhadap mekanisme perdagangan karbon yang secara kepentingan merugikan pemerintah Tiongkok khususnya berdampak pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi di Tiongkok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan iklim dunia yang dulu hanya digulirkan beberapa orang ahli kemudian menjadi ramai diperbincangkan orang. Apalagi setelah diselenggarakannya pertemuan WMO (*World Meteorology Organization*) pada dekade 1980-an, isu perubahan iklim semakin mendunia. Berbagai penelitian dan data yang ada menggambarkan kaitan yang erat antara peningkatan konsentrasi CO<sub>2</sub> dengan peningkatan temperatur rata-rata permukaan bumi. Demikian pula dengan perkiraan dampak yang akan ditimbulkannya.

Perkembangan cakupan studi Ilmu Hubungan Internasional telah menjadikan Ilmu Hubungan Internasional semakin luas dan semakin kompleks. Pada awal perkembangannya studi ini hanya mencakup interaksi antar bangsa dalam hal perang dan damai namun semakin berkembangnya zaman dan semakin beragamnya kepentingan juga pada akhirnya mengembangkan cakupan serta isu yang dipelajari dan hampir meliputi seluruh aspek kehidupan (politik, sosial, budaya, lingkungan) dan berbagai isu lainnya. Isu lingkungan menjadi topik yang

mendapat porsi yang lebih akhir-akhir ini terkait dengan permasalahan menyangkut lingkungan yang hampir tidak mendapat titik temu dalam pandangan masyarakat.

Perkembangan inilah yang akhirnya mendorong *World Meteorological Organization* (WMO) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 1988. IPCC sendiri merupakan kelompok para ilmuwan dari seluruh dunia yang bertugas untuk meneliti fenomena perubahan iklim serta solusi yang diperlukan. Laporan pertama IPCC diterbitkan pada tahun 1990 dan dikenal sebagai *First Assessment Report* yang menyimpulkan suhu meningkat sekitar 0,3-0,6° C dalam satu abad terakhir.<sup>12</sup> Laporan itu juga menyebutkan emisi yang dihasilkan manusia telah menambah gas rumah kaca alami dan penambahan itu akan menyebabkan kenaikan suhu. Karenanya, IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangnya. Pada Desember 1990, Majelis Umum PBB akhirnya menanggapi seruan IPCC untuk mengatasi masalah perubahan iklim secara global dengan meluncurkan negosiasi mengenai kerangka konvensi perubahan iklim dan dengan membentuk *Intergovernmental Negotiating*

*Committee* (INC) untuk pelaksanaan negosiasi tersebut. Akhirnya, pada bulan Mei 1992, INC menyepakati Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC).<sup>13</sup>

PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau Konferensi Khusus tentang Masalah Lingkungan dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*) pada 1992 di Rio de Janeiro, Tiongkok. KTT Bumi menekankan pentingnya semangat kebersamaan (multilateralisme) untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan (oleh *developmentalist*) dan upaya-upaya melestarikan lingkungan (oleh *environmentalist*). Setelah diratifikasi oleh sekitar 175 negara, pada tanggal 21 Maret 1994, Konvensi Perubahan Iklim akhirnya dinyatakan berkekuatan hukum dan bersifat mengikat para pihak yang telah meratifikasi.

Isu target pengurangan emisi gas-gas rumah kaca bukan hal tabu bagi Tiongkok. Namun, negeri terbesar di Amerika Latin itu tidak menentukan target penurunan emisi dalam Konferensi Para Pihak Ke-15 (COP-15) mengenai Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim di

---

<sup>12</sup> IPCC., *Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm 32

Kopenhagen, Denmark, Desember 2009. Pada tahun 2012 lalu, negara-negara didunia mengadakan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2012 adalah sebuah konferensi tahunan ke-18 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dan konferensi tahunan ke-8 *Meeting of the Parties* (CMP) sejak Protokol Kyoto disahkan pada tahun 1997. Konferensi ini berlangsung dari Senin 26 November hingga Sabtu 8 Desember 2012 di Qatar National Convention Centre, Doha.<sup>14</sup>

Konferensi ini sepakat untuk memperpanjang masa berlaku dari Protokol Kyoto – yang sedianya akan berakhir pada akhir 2012 – hingga tahun 2020, dan juga disepakati bahwa pengganti Protokol Kyoto akan dirumuskan pada tahun 2015, dan dilaksanakan pada tahun 2020. Konferensi ini juga memperkenalkan konsep "kerugian dan kerusakan" untuk pertama kalinya, yaitu prinsip kesepakatan yang menyatakan bahwa negara-negara kaya bisa bertanggung jawab secara finansial kepada negara-negara lain karena kegagalan mereka dalam mengurangi emisi karbon. Hasil dari konferensi lingkungan hidup dunia ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Lembar perjanjian tersebut disebut dengan *The Doha Climate Gateway*. Dokumen tersebut berisikan

beberapa kesepakatan yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Perpanjangan masa berlaku Protokol Kyoto hingga tahun 2020, yang membatasi emisi karbon dioksida global dalam skop hanya 15% karena kurangnya partisipasi Kanada, Jepang, Rusia, Belarus, Ukraina, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Selain itu, fakta bahwa negara-negara berkembang seperti RRC (emitor terbesar di dunia), India dan Tiongkok juga tidak tunduk pada pengurangan emisi di bawah ketentuan Protokol Kyoto.
2. Konsep "kerugian dan kerusakan" (*loss and damage*) diresmikan untuk pertama kalinya dalam dokumen konferensi.
3. Konferensi ini membuat sedikit kemajuan terhadap pendanaan Green Climate Fund.

Pemerintah Tiongkok merupakan salah satu pemerintah dari perwakilan negara non anex yang menolak mekanisme perdagangan karbon. Menurut pemerintah Tiongkok hal ini tidak memberikan keadilan bagi masing-masing negara, bahkan berdampak pada kerugian yang dialami negara berkembang. Beberapa alasan yang mendorong Pemerintah Tiongkok menolak untuk meratifikasi

---

<sup>14</sup> "Decision on the host of COP 18/CMP 8". United Nations Climate Change Secretariat. Diakses pada 7 Mei 2012

---

<sup>15</sup> "Climate talks: UN forum extends Kyoto Protocol to 2020". BBC News. 8 Desember 2012

kesepakatan *Doha Climate Gateway* adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Perdagangan Karbon  
Merugikan Kepentingan Tiongkok

Secara konseptual, ekspektasi ekonomi hijau adalah terjadinya keseimbangan antara kebutuhan dan keterbatasan alam. Kecenderungan manusia untuk terus menerus mengeksploitasi sulit dihindari, sementara alam memiliki siklus yang membutuhkan waktu untuk menyediakan sumber daya yang cukup. Kunci ekonomi hijau terletak pada upaya manusia me-manage lingkungan supaya tetap *sustained* memenuhi kebutuhan manusia. Namun dalam prakteknya, konsep ini akan sangat mudah dimanfaatkan oleh negara-negara maju yang menawarkan aktivitas pelestarian alam di negara berkembang. Dalam logika pemantik, keterbatasan ini akan berusaha dipertahankan agar negara-negara maju dapat tetap memainkan peran dengan gagasan ekonomi hijau.

Bustanul Arifin dalam sebuah kolom media dengan tegas membahasakan bahwa ekonomi hijau dapat menjadi pasar jual-beli jasa lingkungan hidup, yang pastinya akan lebih banyak menguntungkan negara-negara maju yang tidak lain juga adalah sumber datangnya perusahaan-perusahaan yang berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan. Contohnya REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), disatu sisi dapat

dianggap sebagai bagian *green economy* karena investasinya yang besar dalam upaya pengurangan emisi, degradasi lingkungan dan deforestasi, tetapi di sisi lain, aktivitas ini adalah kontribusi dari salah satu negara penyalur pencemaran/kerusakan lingkungan terbesar di dunia, yang pastinya juga akan mendapat untung yang lebih besar ketika program ini dilangsungkan. "Dalam konteks dunia, *green economy* sejauh ini mendapat predikat baik, bahkan mendapat dukungan berbagai negara, terutama dari negara dunia ketiga yang umumnya menjadi lahan eksploitasi sumber daya alam. Padahal, ketika ekonomi hijau sudah bekerja, pada saat yang sama aktivitas ini dapat melanggengkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar, begitu juga dengan terjadinya degradasi lingkungan. *Green economy* memberi kemudahan negara maju melakukan aktifitas ekonomi yang dinamis dengan kemasan ramah lingkungan. Di lain hal, negara sedang berkembang – seperti Indonesia – juga tetap membuka diri bagi masuknya investasi asing dengan berbagai konsesi kebijakan. Ibarat musang berbulu domba, ekonomi hijau menjadi instrumen apik yang dilegalisasi pemerintah untuk mengikis aset alam dan merusak ekosistem di negara berkembang".

Munculnya konfigurasi ini memang mudah dituduh sebagai strategi baru kapitalisme. Dalam konteks dunia, *green economy* sejauh ini mendapat predikat baik,

bahkan mendapat dukungan berbagai negara, terutama dari negara dunia ketiga yang umumnya menjadi lahan eksploitasi sumber daya alam. Padahal, ketika ekonomi hijau sudah bekerja, pada saat yang sama aktivitas ini dapat melanggengkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar, begitu juga dengan terjadinya degradasi lingkungan. *Green economy* memberi kemudahan negara maju melakukan aktifitas ekonomi yang dinamis dengan kemasan ramah lingkungan. Di lain hal, negara sedang berkembang – seperti Indonesia – juga tetap membuka diri bagi masuknya investasi asing dengan berbagai konsesi kebijakan. Ibarat musang berbulu domba, ekonomi hijau menjadi instrumen apik yang dilegalisasi pemerintah untuk mengikis aset alam dan merusak ekosistem di negara berkembang. Sungguh sebuah dilema bagi negara-negara yang terlanjur memelihara kapitalisme di buminya.

Dalam konteks yang lain, ekonomi hijau juga dapat berupa inovasi bagi peningkatan produksi perekonomian. Di sektor pertanian, petani diarahkan untuk menggunakan bibit unggul dan peralatan canggih yang diperoleh dari impor. Artinya, peningkatan produksi pangan tidak lagi bersifat kontekstual locally, melainkan lebih mengandalkan rekayasa genetik dan teknologi dari luar. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ekonomi hijau, hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu di Indonesia melalui program "revolusi hijau".

Implikasinya kini sudah menggantikan bibit lokal, pupuk organik/alami, cangkul, pacul, dan kerbau sebagai kearifan bertani lokal. Disini sekali lagi menguntungkan asing, sebab ketergantungan akan tercipta dan kearifan lokal perlahan ditinggalkan bahkan mungkin terlupakan.

Jadi, menurut Marshall Plan, gagasan ekonomi hijau sangat beralasan untuk diwaspadai. Karena sangat mungkin implementasinya tidak lain adalah ajang kapitalisme baru yang kini sudah dengan kemasan semakin peduli lingkungan. Secara substansi, kapitalisme akan selalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga ekonomi hijau yang digagas pada KTT Rio+20 akan mudah dimanfaatkan bagi negara maju sebagai legitimasi aktivitasnya untuk tetap mengeruk laba dari sumber daya alam negara berkembang. Hal ini ditambahkan dengan masih belum ada defenisi yang jelas dan pasti mengenai green economy yang dapat diterima oleh komunitas dunia (CSO/aktivis pemerhati lingkungan, pengamat, maupun pemerintah/negara). Rumusan hasil KTT masih kabur dan belum memiliki instrumen yang tegas untuk melindungi bumi. Dengan belum adanya kejelasan, berbagai kepentingan akan gampang bermain di dalamnya.

Mekanisme Pengembangan Energi Bersih (SDM) dan mekanisme perdagangan karbon yang terkait di bawah Protokol Kyoto (1997) akan berakhir di penghujung

tahun ini. Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties/COP) di Durban, 2011, memperpanjang masa berlaku protokol hingga tahun 2015, namun masih belum jelas apa rencana selanjutnya. Pasar perdagangan karbon terbesar di dunia, EU, mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menerima CER (Sertifikat Penurunan Emisi) setelah tahun 2012 ini, kecuali bagi yang berasal dari negara-negara berkembang papan bawah. Tiongkok terdaftar sebagai negara yang memiliki proyek-proyek yang lolos persyaratan untuk memperoleh CER di bawah pengaturan mekanisme yang berlaku sekarang. Tetapi setelah tahun 2012 ini, Tiongkok tidak bisa lagi menawarkan kredit karbon untuk pasar internasional kecuali ada mekanisme global yang baru.<sup>16</sup> Namun kelihatannya perdagangan karbon akan terus berjalan sendiri tanpa terikat oleh aturan protokol internasional tertentu. Bentuk baru perdagangan karbon yang muncul saat ini disebut dengan “Voluntary Carbon Offset” (VCO), yang berarti perdagangan karbon bilateral dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak swasta ataupun negara, dan perdagangan dalam bentuk skema mandatori diwajibkan atas dasar kebijakan sebuah negara) atau disebut dengan istilah “*Cap and Trade*”.

---

<sup>16</sup> Melani Tedja, “Menyongsong mekanisme jual beli karbon Hutan”, dalam [www.ford-mof.org](http://www.ford-mof.org), diakses Pada Juni 2011

## 2. Negara Annex 1 Mendesak Tiongkok untuk Meratifikasi Kesepakatan Perdagangan Karbon

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan alam adalah dengan cara mitigasi (*mitigation*) adalah tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk meningkatkan penyimpanan karbon dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Sedangkan adaptasi (*Adaptation*) adalah tindakan penyesuaian oleh sistem alam atau manusia yang berupaya mengurangi kerusakan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.<sup>17</sup> REDD dalam menjalankan peran sebagai pemberi kompensasi untuk perlindungan hutan dari dampak emisi karbon negara maju (akibat adanya perdagangan karbon) tidak menyertakan adanya pembatasan transaksi pembuangan gas emisi karbon ke belantara hutan Indonesia. Jelasnya, perdagangan karbon sebagai transaksi pasar berjalan beriringan dengan upaya mengurangi dampak emisi karbon di hutan.

Jadi secara logika, aktivitas REDD ini sama halnya dengan memelihara hutan agar tetap dapat menampung gas buang (CO<sub>2</sub>) dari produksi negara tersebut. Kendatipun REDD beranggapan bahwa aktivitasnya adalah bentuk penghapusan utang (ganti rugi) atas kerusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional asal negara-negara maju, namun dibalik itu

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

ada motif lain yang hendak dicapai, yakni tetap berjalannya perdagangan karbon. Aktivitas REDD ini menjadi satu titik tolak memahami bagaimana kapitalisme bekerja lewat mekanisme ekonomi hijau. "REDD dalam menjalankan peran sebagai pemberi kompensasi untuk perlindungan hutan dari dampak emisi karbon negara maju (akibat adanya perdagangan karbon) tidak menyertakan adanya pembatasan transaksi pembuangan gas emisi karbon ke belantara hutan Indonesia. Jelasnya, perdagangan karbon sebagai transaksi pasar berjalan beriringan dengan upaya mengurangi dampak emisi karbon di hutan. Jadi secara logika, aktivitas REDD ini sama halnya dengan memelihara hutan agar tetap dapat menampung gas buang (CO<sub>2</sub>) dari produksi negara tersebut...ada motif lain yang hendak dicapai, yakni tetap berjalannya perdagangan karbon".

Masuknya REDD ke negara-negara berkembang adalah hasil perjuangan konvensi perubahan iklim (climate change) di Bali tahun 2007. Tetapi diterimanya REDD tidak semata-mata karena alasan lingkungan. Besarnya kompensasi menjadi salah satu faktor pendorong kehadirannya. Makanya, REDD juga mendapat penolakan dari berbagai CSO lokal dan kelompok masyarakat di daerah otonom. Tetapi negara cukup sadar akan ketertinggalannya dalam hal teknologi, rendahnya kemampuan mendanai serta miskinnya strategi dalam

pemanfaatan/pengelolaan lingkungan dan sumber daya sendiri. Sehingga keputusan yang rasional adalah tetap menerima program tersebut. Di sini nampak jelas, kesenjangan (gap) yang ada menjadi celah yang dimanfaatkan oleh negara maju untuk menciptakan ketergantungan sebagai bagian dari kerja kapitalisme baru. Aktivitas kapitalisme memang tidak mudah dikendalikan, terlebih turut ditunjang oleh rendahnya pemahaman masyarakat pun pemerintah sendiri.

### 3. Hambatan Pembangunan Ekonomi terhadap Tiongkok

Sama halnya dengan proyek REDD, jutaan hektar hutan bak ladang karbon yang mampu menghasilkan milyaran dollar. Beberapa negara industri menjalankan program ini, seperti UN-REDD yang menjalankan proyeknya di Tiongkok dengan proyek *The Forest Carbon Partnership Facility* (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan) yang didanai oleh World Bank dan beroperasi di 29 negara.<sup>18</sup> Negara-negara seperti Tiongkok merupakan negara yang menjadi penyerap emisi bagi aktifitas industri di negara maju yang lalu diberi kompensasi sebagai imbalan jasa ekologis. Kita bisa melihat bagaimana fungsi negara dalam menopang sirkulasi capital. Bagi negara industri dari perdagangan karbon justru mendapatkan omzet yang jauh lebih besar, Eropa

---

<sup>18</sup> *Opcit.* Bambang Jatmiko.

misalnya, omset yang diperoleh mencapai 63 milyar dollar.

Secara global jumlah total perdagangan karbon dunia tahun lalu 125 milyar dollar, naik 83% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan meningkat menjadi 150 milyar dollar di tahun 2012. Melalui Climate Exchange, karbon dapat diperdagangkan dimana saat ini tersedia 70 juta ton karbon yang bernilai hingga 500 juta dollar. Sangat ironis bahwa di tengah fakta meningkatnya emisi gas di atmosfer, upaya ini sama sekali tidak memperlihatkan adanya proses menghentikan keputulan emisi dari aktivitas industri. Dalam kurun waktu 1998-2008, similarity index dari produk ekspor industri nasional dengan produk ekspor industri Tiongkok bukannya menurun, tetapi justru meningkat dari 58,9% (1996) menjadi hampir 62% (2008). Ini berarti bahwa struktur perdagangan diantara kedua negara bersifat substitusi daripada komplementer. Pemberlakuan *Asean Tiongkok Free Trade Area (ACFTA)* akan membuat produk industri nasional harus *head to head* bersaing dengan produk industri Tiongkok.

Dengan menggunakan rasio output terhadap tenaga kerja sebagai proksi produktivitas, perhitungan menunjukkan bahwa gap produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan produktivitas tenaga kerja Tiongkok justru semakin melebar. Pada tahun 1996, produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah 70,1% dari produktivitas

tenaga kerja Tiongkok, sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 65,4%. Dibandingkan dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Tiongkok memiliki action plan cukup jelas untuk menata sektor industrinya. Misalnya, Pemerintah Tiongkok menyediakan dana yang cukup besar untuk membantu industri andalan eskpornya, seperti industri TPT, untuk melakukan restrukturisasi permesinan. Tidak mengherankan bila permesinan yang digunakan industri Tiongkok sangat efisien dengan produktivitas tinggi. Misalnya, permesinan yang digunakan industri TPT Tiongkok mampu menghemat energi 17% lebih rendah dari permesinan yang digunakan industri TPT Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Tiongkok menolak mekanisme hasil pengurangan emisi gas karbon dalam *The Doha Climate Gateway* tahun 2012 adalah dikarenakan banyaknya mekanisme perdagangan karbon merugikan kepentingan nasional Tiongkok dan negara-negara Annex 1 yang belum menyepakati hasil konferensi emisi gas karbon. Perdagangan karbon adalah konsep yang menginkorporasikan perubahan iklim ke dalam mekanisme pasar. Ini dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan kapital untuk menguasai sumberdaya alam. Skema global ini hanya layak disebut

sebagai bisnis lingkungan. Skema-skema tersebut berupa *Joint Implement (JI)*, *Clean Mechanism Development (CDM)*, dan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*.

Negara-negara seperti Tiongkok merupakan negara yang menjadi penyerap emisi bagi aktifitas industri di negara maju yang lalu diberi kompensasi sebagai imbalan jasa ekologis. Kita bisa melihat bagaimana fungsi negara dalam menopang sirkulasi capital. Bagi negara industri dari perdagangan karbon justru mendapatkan omzet yang jauh lebih besar, Eropa misalnya, omzet yang diperoleh mencapai 63 milyar dollar. Secara global jumlah total perdagangan karbon dunia tahun lalu 125 milyar dollar, naik 83% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan meningkat menjadi 150 milyar dollar di tahun 2012. Melalui *Climate Exchange*, karbon dapat diperdagangkan dimana saat ini tersedia 70 juta ton karbon yang bernilai hingga 500 juta dollar. Sangat ironis bahwa di tengah fakta meningkatnya emisi gas di atmosfer, upaya ini sama sekali tidak memperlihatkan adanya proses menghentikan kepulan emisi dari aktivitas industri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Banyu Perwira, Anak Agung. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakary, Bandung.
- Hans Morgenthau. 1973. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf.
- IPCC. 2005. *Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Jack C. Plano. Roy Olton, 1999. *Kamus Hubungan Internasional*” cetakan kedua , Penerbit Putra A Bardin.
- K J. Holsti. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Mas’oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.

### Website

- "Climate talks: UN forum extends Kyoto Protocol to 2020". BBC News. 8 Desember 2012

"Decision on the host of COP 18/CMP 8".  
United Nations Climate Change  
Secretariat. Diakses pada 7 Mei  
2012

Melani Tedja, "Menyongsong mekanisme  
jual beli karbon Hutan",  
dalam [www.ford-mof.org](http://www.ford-mof.org), diakses  
Pada Juni 2011